

**PERLAWANAN PARA JURNALIS  
(Harian *Kompas* dalam Peristiwa Bredel' 94)**

Abdul Firman Ashaf  
Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung  
E-mail: *ashafnov2004@yahoo.com*

**ABSTRACT.** This article aims to show the politics of journalism of *Kompas* and its response of mass media banning 1994. Politics of journalism is defined by the tendency of press which does not only reflect of political reality, but also active involvement, through news representation, in political reality. By using qualitative content analysis through "historical-description" on newspaper content, this article identifies and describes significant elements in content of news, both through partial and complete, in its relation historical context. Its result is found that *Kompas* applies the discourse strategy which delegitimizes, in its news text, and also responds given by all its journalists. Historical context recognized the background of character resistance of all the journalists because by pre-transition situation of New Order regime, which in the end, known latter, makes 'May Revolution' fall into Soeharto regime.

**Key Words:** politics of journalism, media discourse, resistance

**ABSTRAK.** Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan politik jurnalisme *Kompas* dalam menyikapi pembredelan pers 1994. Politik jurnalisme didefinisikan sebagai kecenderungan pers yang tidak hanya merefleksikan realitas politik, namun juga aktif terlibat, melalui representasi pemberitaan, dalam realitas politik. Dengan menggunakan analisis isi kualitatif, melalui "deskripsi-historis" isi surat kabar, tulisan ini mengidentifikasi dan memaparkan elemen-elemen isi pemberitaan yang signifikan, baik secara parsial maupun keseluruhan, dalam hubungannya dengan konteks historis tertentu. Hasilnya, ditemukan bahwa *Kompas* menerapkan strategi diskursus yang delegitimatif, baik dalam teks pemberitaannya, maupun respon yang diberikan oleh para jurnalisnya. Konteks historis yang dikenali dalam melatarbelakangi karakter resistensi para jurnalis tersebut karena situasi pra transisi yang dialami rezim Orde Baru, yang pada akhirnya, belakangan diketahui, melahirkan 'Revolusi Mei' yang menjatuhkan rezim Soeharto.

**Kata Kunci:** politik jurnalisme, resistensi

**PENDAHULUAN**

Selasa, 21 Juni 1994, Direktur Jenderal Pers dan Grafika, Departemen Penerangan, Subrata, mengadakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan pencabutan izin tiga penerbitan, yaitu *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*. Apa alasan seputar pembredelan? Dalam pernyataan pencabutan

SIUPP tiga penerbitan itu, Menteri Penerangan tidak menjelaskan apa yang salah dalam penerbitan mereka. Direktur Jenderal Pers dan Grafika Departemen Penerangan, Subrata, yang menandatangani keputusan pembatalan SIUPP atas nama Menteri Penerangan, juga tidak memberikan komentar ihwal artikel mana yang telah mengganggu stabilitas nasional. Namun, Menteri Penerangan menjelaskan alasan pencabutan SIUPP tersebut: (1) *Tempo*: sejak izinnnya dibekukan sementara tahun 1982, *Tempo* telah 6 kali diperingatkan melalui surat dan 33 kali secara lisan. Beberapa isi majalah itu dianggap "menyimpang dari jurnalisme yang sehat, yakni yang bebas dan bertanggung jawab"; (2) *Editor*: pelanggaran pendaftaran (perizinan). *Editor* tak mendaftarkan kembali ketika terjadi pergantian jabatan pemimpin redaksi; (3) *Detik*: pelanggaran atas pemberitaan. Izin terbit *Detik* adalah media yang meliput kriminal dan detektif, namun tabloid itu lebih banyak memberitakan masalah politik.

Namun, beberapa pengamat menganggap bahwa alasan tersebut dibuat-buat. Pengamat media percaya bahwa pemicu pembredelan tersebut adalah cara pemberitaan ketiga media tersebut perihal kontroversi pembelian kapal perang bekas dari Jerman yang melibatkan Menristek Habibie serta ramainya pemberitaan isu suksesi pada awal tahun 1994 yang memicu kejengkelan Soeharto.

Peristiwa-peristiwa ini, tentu saja, melibatkan respon yang sangat luas dari kalangan pers Indonesia. Bagaimana respon mereka atas peristiwa tersebut? Secara lebih khusus berkaitan dengan tulisan ini, bagaimana respon harian *Kompas* – sebagai organisasi pers terbesar dalam skala ekonomi, politis, dan kebudayaan – menyikapi pembredelan tersebut ?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Tulisan ini bermaksud untuk melukiskan politik jurnalisme *Kompas* sebagaimana yang tercermin dalam pemberitaannya, dalam kaitannya dengan respons jurnalis dan konteks sosial politik pada masa Orde Baru. Secara lebih rinci, tulisan ini bermaksud menjawab sejumlah persoalan yaitu: (a) Bagaimana orientasi pemberitaan harian *Kompas* yang berkaitan dengan retorika yang berkembang dalam pemberitaan perihal pembredelan 3 penerbitan pers, yaitu *TEMPO*, *Editor* dan *Detik* (21 Juni 1994) (b) Bagaimana keterkaitan antara respons para jurnalis, konteks sosial politik terhadap pemberitaan *Kompas* pada masa Orde Baru?

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Secara khusus penelitian ini mengkaji sebuah kecenderungan yang penting dalam kajian komunikasi massa, yaitu *politik jurnalisme pers*. Konsep ini mengacu pada pandangan konstruktivis bahwa sesungguhnya media aktif dan kreatif dalam merespons realitas. Dengan kata lain, dalam pengertian "politik jurnalisme pers", pers tidak semata sebagai objek yang pasif, tetapi juga sebagai pelaku yang aktif dan terlibat – lewat pemberitaan – dalam realitas politik. Dua kategori yang dikembangkan untuk memahami politik jurnalisme pers adalah hegemoni dan

resistensi. Demi kepentingan kajian ini, saya membangun terminologi tertentu dengan mengadopsi dan memformulasi model yang digunakan oleh Fairclough dan van Dijk, yaitu: *historis*, *teks*, dan *respons*. Terminologi 'historis' menyandarkan diri pada pemahaman *sociocultural practices* yang dikemukakan oleh Fairclough, sekaligus juga, selain menyadari bahwa peristiwa yang dikaji telah berlalu, juga mengabsorpsi syarat utama pengkajian wacana media yang menekankan unsur sejarah. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara implisit model analisis sosial yang dikembangkan van Dijk cenderung mengarah pada determinasi, yang mengasumsikan bahwa produksi wacana yang berkembang dalam masyarakat, karena mekanisme praktik kekuasaan (*power*) dan ketidaksetaraan akses (*access*), serta merta akan menghasilkan wacana yang dominan. Fairclough, dengan pandangan '*sociocultural practices*-nya', terasa lebih longgar, karena mengisyaratkan adanya proses transaksi dan pasang surut yang dinamis antara pelaku-pelaku sosial. Selanjutnya, 'respons' lebih dekat pada pemahaman 'kognisi sosial' yang dikemukakan oleh van Dijk. Mengapa? Karena, apabila Fairclough dengan '*discourse practices*' memiliki tendensi untuk menangkap setting alamiah dari pelaku, dengan melihat proses-proses rutinitas, relasi-relasi di ruang redaksi, maka 'respons' dengan mengikuti pandangan tentang kognisi sosial, didefinisikan secara lebih longgar, karena dibatasi untuk memahami objek penelitian dengan memanfaatkan respon para jurnalis melalui produksi teks yang mereka hasilkan berupa opini di media massa, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Hambatan untuk menangkap setting alamiah pada *news room* juga berkaitan dengan telah berlalunya peristiwa tersebut ketika penelitian ini dilakukan. Berkaitan dengan teks, apabila dalam pemahaman Fairclough dan van Dijk, *texts* dipahami lewat analisis *critical linguistik*, maka 'teks' dalam kajian ini selain mengeksplorasi dimensi linguistiknya, juga meletakkannya dalam sebuah 'deskripsi isi historis', yang bertujuan untuk melihat aspek-aspek yang bermakna pada teks, baik parsial maupun keseluruhan, dalam hubungannya dengan respons dan konteks<sup>1</sup>

#### **METODE**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari isi (*content*) pemberitaan harian *Kompas*, dan penelusuran kepustakaan. Pemberitaan dianalisis dengan analisis isi kualitatif dengan melakukan "deskripsi-historis"<sup>2</sup> isi surat kabar, dalam hal ini pemberitaan *Kompas*. Pengertian "deskripsi-historis" disini mengacu pada upaya untuk mengidentifikasi dan kemudian memaparkan elemen-elemen isi pemberitaan yang signifikan, baik secara parsial maupun keseluruhan, dalam hubungannya dengan konteks historis tertentu. Metode ini bermanfaat untuk melihat sikap dan dinamika surat kabar yang tercermin dalam pemberitaannya tentang isu-isu tertentu. Identifikasi dan pemaparan elemen-elemen pemberitaan tersebut

---

<sup>1</sup> Perihal model van Dijk dan Fairclough, lihat Eriyanto, 2001: bab 10 dan 11

<sup>2</sup> Salah satu riset yang secara eksplisit menggunakan metode ini adalah Abar (1995)

dilakukan dengan menggunakan kategori, yaitu: *medan wacana* (apa yang terjadi?), *penyampai wacana* (siapa yang berbicara?), dan *mode wacana* (peranan bahasa yang digunakan) (Halliday & Hassan, 1992:1-39).<sup>3</sup>

## PEMBAHASAN

### Teks Pemberitaan: Retorika yang Berkembang atas Pembredelan

#### Medan Wacana

Penelusuran *medan wacana* (apa yang terjadi?) terhadap pemberitaan *Kompas* terindikasi dari penggambaran pembredelan yang dilakukan pemerintah, penggambaran tanggapan korban pembredelan, dan penggambaran tanggapan pihak ketiga atas pembredelan.

Secara keseluruhan bagian pemberitaan, yang berkaitan dengan peristiwa pembredelan yang dilakukan pemerintah oleh *Kompas* dinilai sebagai peristiwa yang bernilai politis. Dalam satu kesempatan *Kompas* mengutip secara *rigid* pernyataan Drs. Subrata, namun pada kesempatan lain menyajikan bahwa Harmoko figur yang ambivalen dalam menjelaskan keputusannya itu. Harmoko tergambarkan sangat reaktif. Dengan mengutip acara tanya jawab antara Harmoko dan Anggota DPR, *Kompas* menyajikan karakter negara lewat *performance* Harmoko. Sebuah metafora, sekalipun menggunakan retorika hukum, apa yang nampak dipermukaan sangat sarat politis. Karena itu, dukungan legitimasi atas keputusan ini haruslah didukung oleh ABRI. Namun demikian, *Kompas* menyajikan gambaran yang konfliktual. Disaat Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Drs. M. Hindarto dan Kasum ABRI Letjen HBL Mantiri digambarkan begitu tegas mendukung keputusan tersebut, pada bagian lain Kapuspen ABRI, Brigjen TNI Syarwan Hamid ditunjukkan dalam posisi secara normatif menolak pembredelan tersebut, begitu pula dengan Deputi Kapolri Mayjen (Pol) Drs. Koesparmono Irsan.

Sementara itu, secara keseluruhan bagian pemberitaan, yang berkaitan dengan tanggapan korban pembredelan atas pembredelan tersebut adalah bahwa

<sup>3</sup> Medan Wacana (*field of discourse*), merujuk pada hal yang terjadi, apa yang dijadikan wacana oleh pelaku (media massa), dan mengenai sesuatu yang terjadi di lapangan peristiwa. Misalnya dalam kasus pembredelan *Tempo*, *Editor* dan *Detik*, apakah merupakan peristiwa pembatalan SIUPP semata, ataukah peristiwa perilaku represif Orde Baru. Penyampai Wacana (*tenor of discourse*), merujuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks, karakter, kedudukan dan peranan mereka. Misalnya dalam kasus pembredelan *Tempo*, *Editor* dan *Detik*, siapa yang dikutip dan bagaimana sumber tersebut digambarkan, dan Mode Wacana (*mode of discourse*), merujuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa: bagaimana komunikator (media) menggunakan gaya bahasa yang menggambarkan situasi dan pelibat (orang-orang yang dikutip), apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, eufemistik, atau vulgar (Halliday & Hassan, 1992:16) Kategori ini lazim digunakan dalam riset semiotika sosial. Untuk penerapannya dalam riset lihat a.l, Hooker (1996: 56-76). Hooker menggunakan kategori ini untuk membandingkan pidato-pidato Soekarno dan Soeharto yang disebutnya sebagai representasi bahasa Orde Lama dan Orde Baru. Untuk penerapan khusus pada pers, lihat Sudiby, et.al, (2001)

pembredelan tersebut oleh *Kompas* dinilai gegabah, karena ketidakjelasan ukuran-ukuran yang digunakan untuk melakukan tindakan pembredelan. Reaksi Fikri Jufri dan Toriq Hadad, oleh *Kompas*, digambarkan sangat rasional dalam mempertanyakan alasan-alasan dibalik pembredelan. Argumentasi rasional Jufri dan Hadad tersebut dan reaksi normatif Goenawan Mohammad menempatkan pencitraan keputusan pemerintah tersebut diputuskan tanpa alasan yang memadai dan cacat secara etis.

Selanjutnya, secara keseluruhan bagian pemberitaan, yang berkaitan dengan tanggapan pihak ketiga perihal pembredelan tersebut terdiri dari dua pihak. Pihak yang pertama melakukan protes atas tindakan pemerintah itu. Melalui pihak yang pertama ini, *Kompas* meyakini bahwa persoalan pencabutan SIUPP ketiga media massa tersebut bukanlah lagi sekedar persoalan antara pemerintah dan korban pembredelan, namun telah menjadi masalah publik. Oleh karena itu pemerintah tidak cukup hanya menggunakan argumentasi yuridis, karena justru pada elemen inilah tindakan tersebut dinilai sangat "lemah". Argumentasi terhadap lemahnya pembenaran yuridis pemerintah, dilakukan *Kompas* dengan menempatkan secara cukup signifikan komentar para ahli hukum ternama. Namun, dalam kacamata pendukung keputusan pemerintah tersebut, tindakan pemerintah dilakukan demi menjaga sebuah orde yang telah mapan, yang dalam bahasa relasi pers dan negara dikenal dengan jargon "pers bebas dan bertanggungjawab". Oleh karena itu, setiap unsur dalam masyarakat yang mengganggu keserasian hubungan pemerintah, pers, dan masyarakat akan dikerangkakan dalam pola relasi diatas. Dengan demikian, semua tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pers, merupakan tindakan yang sudah dipikirkan secara mendalam dan mempertimbangkan segenap kepentingan masyarakat pers secara luas.

### **Penyampai Wacana**

Penelusuran *penyampai wacana* (siapa yang berbicara?) terhadap pemberitaan *Kompas* terindikasi dari penggambaran perspektif pemerintah atas pembredelan, penggambaran perspektif korban pembredelan, dan penggambaran perspektif pihak ketiga atas pembredelan.

Dalam membangun narasi berkaitan perspektif pemerintah dalam keputusan tersebut, *Kompas* menggunakan sumber-sumber antara lain: Drs. Subrata (Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika), Harmoko (Menpen), Mayjen (Pol) Drs. M. Hindarto (Kapolda Metro Jaya), Letjen HBL. Mantiri (Kasum ABRI), Brigjen TNI Syarwan Hamid (Kapuspen ABRI), dan Mayjen (Pol) Drs. Koesparmono Irsan (Deputi Kapolri).

Menurut *Kompas*, Subrata dan Harmoko digambarkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan tersebut, namun dalam pemberitaan *Kompas*, keduanya ditampilkan secara berbeda. Hal ini terlihat ketika *Kompas* menampilkan Harmoko sebagai figur yang tidak kompeten untuk mengartikulasikannya kepada publik. Selanjutnya, Hindarto dan Mantiri, diperlihatkan *Kompas* sebagai sosok yang loyal pada politik *mainstream*. Namun,

*Kompas* juga menyajikan perspektif yang berbeda, ketika ia menempatkan Syarwan Hamid dan Koespramono Irsan, dalam posisi berseberangan, sekalipun tidak secara vulgar. Pandangan-pandangan yang terepresentasikan dalam sosok ABRI pada Hindarto dan Mantiri, oleh *Kompas*, ditempatkan secara oposisioner dengan sosok lainnya, Syarwan Hamid dan Koespramono Irsan.

Dalam membangun narasi berkaitan dengan tanggapan korban pembredelan, *Kompas* menggunakan sumber-sumber antara lain: Fikri Jufri (Wakil Pemimpin Redaksi *Tempo*), Toriq Hadad (Wartawan *Tempo*), Edi Herwanto (Pemimpin Perusahaan *Editor*), dan Goenawan Mohammad (Pemimpin Redaksi *Tempo*).

Fikri Jufri, Edi Herwanto dan Toriq Hadad, oleh *Kompas*, digambarkan sebagai pihak yang rasional dengan argumentasi pragmatis mempertanyakan alasan pembredelan dan implikasi yang dihasilkannya. Goenawan Mohammad, digambarkan sebagai sosok yang peka terhadap alasan-alasan normatif dibalik pembredelan tersebut.

Dalam membangun narasi berkaitan dengan tanggapan pihak ketiga atas pembredelan, *Kompas* menggunakan sumber-sumber antara lain: SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Komnas HAM, Fordem (Forum Demokrasi), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Isafis (*The Indonesia Studies Association for International Studies*), Anggota DPR dari F-KP, Krissantono, Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, DPP PDI, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang diketuai Abdul Hakim Garuda Nusantara, Forum Santri Indonesia, yang diketuai Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Ulil Abshar-Abdalla, PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), juga beberapa tokoh pro demokrasi seperti Dr. Sri Bintang Pamungkas, Dr. Adnan Buyung Nasution, dan Mulyana W. Kusumah, Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa, Dr. Todung Mulya Lubis SH, Dr. Erman Radjaguguk, SH, Amir Syamsuddin SH, Dr. Loebby Loqman, Satya Arinanto SH, dll.

Sebagian besar dari mereka yang dijadikan *Kompas* untuk mengkonstruksi realitas adalah orang-orang yang dikenal masyarakat sebagai ahli hukum, dan sebagian lainnya adalah cendekiawan, politisi, dan aktivis pada Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka yang ahli hukum mengembangkan pandangan seragam perihal tidak taatnya pemerintah Orde Baru pada hukum. Sedangkan sebagian lainnya memiliki kapasitas yang memadai untuk menilai keputusan pemerintah dari perspektif mereka masing, namun sebagian besar dari mereka menyerang keputusan tersebut dari ukuran-ukuran normatif.

Namun, *Kompas* juga menyediakan ruang bagi pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang menyetujui, mendukung, atau minimal tidak menolak dan atau bisa memahami tindakan pemerintah tersebut. Sumber-sumber yang dikutip *Kompas*, antara lain: DPP Golkar, DPP MKGR, PP Pemuda Panca Marga, Forum Pemuda Pembela Pers Pancasila, dan Ketua Umum DP PPP Ismail Hasan Metareum

Secara umum pihak ketiga yang mendukung tindakan pemerintah, adalah agen-agen pendukung Orde Baru. Pandangan yang dikembangkan adalah bahwa kebebasan pers dalam mengantisipasi prinsip-prinsip keterbukaan yang didorong oleh pemerintah, cenderung keluar dari format kebebasan bertanggungjawab sebagaimana dikehendaki prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, bahkan cenderung kearah kebebasan liberal. Oleh karena itu tindakan pemerintah, dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia dari informasi yang mengganggu keserasian antara dan intern masyarakat, pers, dan pemerintah. Dalam beberapa hal ini merupakan retorika standar.

### Mode Wacana

Penelusuran *mode wacana* (peranan bahasa yang digunakan) terhadap pemberitaan *Kompas* terindikasi dari strategi bahasa dalam menggambarkan peristiwa dan perspektif pemerintah atas pembredelan, peristiwa dan perspektif korban pembredelan, dan peristiwa dan perspektif pihak ketiga atas korban pembredelan.

Strategi bahasa untuk membangun narasi berkaitan dengan keputusan pemerintah tersebut, *Kompas* menggunakan sumber-sumber antara lain: Drs. Subrata (Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika), Harmoko (Menpen), Mayjen (Pol) Drs. M. Hindarto (Kapolda Metro Jaya), Letjen HBL. Mantiri (Kasum ABRI), Brigjen TNI Syarwan Hamid (Kapuspen ABRI), dan Mayjen (Pol) Drs. Koesparmono Irsan (Deputi Kapolri).

Sementara itu, strategi bahasa dalam menggambarkan pemerintah sebagai pelaku pembredelan dan perspektif yang diajukannya menunjukkan bahwa pemberitaan dipenuhi dengan toleransi diksi, parafrase, dan proposisi untuk menggambarkan pihak pemerintah sebagai pelaku pembredelan dan perspektif yang diajukannya adalah konfliktual. Disatu sisi, misalnya: *Kompas* toleran atas diksi "pembatalan", bukan pembredelan. Tidak ada latar yang diajukan *Kompas*, untuk mengesankan bahwa pembatalan sinonim dengan pembredelan; atau Menpen, menurut *Kompas*, "*meminta kepada semua pihak mengendapkan peristiwa*" tersebut dan kemudian "*mengadakan introspeksi*". Menpen juga disebutkan menginginkan "*perlunya kesamaan persepsi tentang kebebasan pers yang bertanggungjawab dari para pelakunya sebelum memulai pembicaraan pada tahapan selanjutnya*"; atau perihal "*politisasi pers*" yang dilansir Harmoko. Dia "*mengingatkan masyarakat pers agar waspada dan jangan sampai lengah terjerumus ke permainan politik kalangan tertentu*". Diingatkannya, "*masa tahun 60-an ketika pers lengah dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik komunis*". Namun, disisi lain, pemerintah dan perspektif yang diajukannya, oleh *Kompas*, ditampilkan tidak tunggal. *Kompas* juga menyajikan strategi wacana alternatif terhadap retorika dominan, misalnya: Kapuspen ABRI, Brigjen TNI Syarwan Hamid menyatakan "*sangat prihatin atas pembatalan SIUPP tersebut. Tindakan tersebut sangat disayangkan dan sepatutnya tidak perlu terjadi*"; atau Deputi Kapolri Mayjen (Pol) Drs. Koesparmono Irsan, yang mengatakan "*Menyalurkan*

*pendapat secara demokratis tidak dilarang. Silahkan saja, mau bertemu langsung dengan pejabatnya, tapi tidak melanggar aturan-aturan yang sudah baku dan tertulis*" Hal ini merupakan penegasan ketidakabsahan tindakan pemerintah dalam pandangan publik, sekaligus legitimasi upaya-upaya untuk mempertanyakannya lewat cara demonstrasi yang demokratis

Dalam membangun narasi berkaitan dengan tanggapan korban pembredelan, *Kompas* menggunakan sumber-sumber antara lain: Fikri Jufri (Wakil Pemimpin Redaksi *Tempo*), Toriq Hadad (Wartawan *Tempo*), Edi Herwanto (Pemimpin Perusahaan Editor), dan Goenawan Mohammad (Pemimpin Redaksi *Tempo*).

Selanjutnya, strategi bahasa *Kompas* dalam menggambarkan korban pembredelan dan perspektif yang diajukannya menunjukkan bahwa pemberitaan dipenuhi dengan toleransi diksi, parafrase, dan proposisi untuk menggambarkan bahwa korban pembredelan dalam posisi mempertanyakan keabsahan alasan yang diajukan pemerintah dengan membuat strategi perbandingan untuk mengingatkan publik akan standar ganda yang digunakan untuk kasus berdimensi politik dengan dimensi ekonomi, misalnya: Fikri Jufri yang menyatakan: "*Dari mana hitungannya ? Apa sejak Tempo terbit ? [...] Apakah tidak sebaiknya lewat peradilan saja untuk menghukum kesalahan Tempo. Edi Tansil pun kan diselesaikan lewat pengadilan*"; atau *Kompas* mengutip kata-kata Hadad: "*Kesalahan substansi itu apa ? Sebetulnya kan bisa diajukan ke pengadilan. ET (Penulis: Edi Tansil) yang merugikan negara Rp. 1,3 trilyun saja masih diberi kesempatan membela diri di pengadilan*"

Dalam membangun narasi berkaitan dengan tanggapan pihak ketiga atas pembredelan, *Kompas* menggunakan sumber-sumber antara lain: SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Komnas HAM, Fordem (Forum Demokrasi), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Isafis (*The Indonesia Studies Association for International Studies*), Anggota DPR dari F-KP, Krissantono, Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, DPP PDI, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat yang diketuai Abdul Hakim Garuda Nusantara, Forum Santri Indonesia, yang diketuai Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Ulil Abshar Abdalla, PMKRI (Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), juga beberapa tokoh pro demokrasi seperti Dr. Sri Bintang Pamungkas, Dr. Adnan Buyung Nasution, dan Mulyana W. Kusumah, Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa, Dr. Todung Mulya Lubis SH, Dr. Erman Radjaguguk, SH, Amir Syamsuddin SH, Dr. Loebby Loqman, Satya Arinanto SH, dll.

Strategi bahasa *Kompas* dalam menggambarkan pihak ketiga dan perspektif yang diajukannya, menunjukkan bahwa pemberitaan dipenuhi dengan toleransi diksi, parafrase, dan proposisi untuk menggambarkan bahwa pihak ketiga didominasi oleh perspektif yang menolak pembredelan, misalnya: Kutipan *Kompas* : bahwa pencabutan SIUPP sebagai "*langkah mundur yang sangat disayangkan. Tindakan tersebut memprihatinkan, terutama dilihat dari*

*implementasi hak-hak untuk menyampaikan dan memperoleh informasi serta menyatakan pendapat sesuai UUD 1945*" (Pernyataan Komnas HAM); pembatalan SIUPP "*tidaklah tepat jika alasannya adalah stabilitas nasional, karena tidak ada gejala atau bukti terjadinya goncangan yang diakibatkan oleh pemberitaan pers*" (Abdurrahman Wahid dari Fordem); "*secara yuridis konstitusional, kebijaksanaan pembatalan SIUPP merupakan kebijakan yang tidak mencerminkan semangat UU No. 21/1982 tentang ketentuan Pokok Pers, yang didalamnya menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan*" (YLBHI); "*pembatalan SIUPP tidak hanya merugikan masyarakat serta pihak media yang bersangkutan, tapi juga merugikan pihak pemerintah Orde Baru yang justru sedang masuk kedalam era keterbukaan*" (Ali Sadikin, Mantan Gubernur DKI Jakarta dan anggota Petisi 50); "*Masalah keterbukaan, adalah milik rakyat, jadi kunci keterbukaan ada pada rakyat*" (Dr. Sri Bintang Pamungkas); "*SK Menpen yang mencabut SIUPP ketiga media massa segera ditarik dan dipulihkannya hak hukum ketiga media massa tersebut*" (Dr. Adnan Buyung Nasution); "*kami sangat memprihatinkan dan menyesalkan kejadian tersebut. Kita adalah negara hukum, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan tanpa ada surat perintah penahanan*" (Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa perihal peristiwa penangkapan dan pemukulan yang dilakukan aparat keamanan atas para pengunjuk rasa keprihatinan)

*Kompas* juga menyajikan kutipan pernyataan dari pihak yang mendukung pembredelan. Kutipan *Kompas* antara lain: "*dapat mengerti maksud dan tujuan dari tindakan pemerintah yang membredel tiga media massa tersebut, karena sesuai dengan prinsip pembinaan dan pengembangan pers yang sehat dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. [...] kebebasan pers dalam mengantisipasi prinsip-prinsip keterbukaan yang didorong oleh pemerintah, cenderung keluar dari format kebebasan bertanggungjawab sebagaimana dikehendaki prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, bahkan cenderung kearah kebebasan liberal*" (siaran pers Golkar); "*memahami dan mendukung tindakan pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia dari informasi yang mengganggu keserasian antara dan intern masyarakat, pers, dan pemerintah*" (siaran pers MKGR); "*Harmoko, your decision is the best*", "*Kikis habis pengunjuk rasa bayaran dari luar yang menggoyahkan Pancasila dan UUD 45*", dan "*Tegakkan pers yang sehat, bebas, dan bertanggungjawab*" (spanduk pengunjuk rasa pendukung pembredelan)

### **Respon *Kompas* dalam Konteks Historis Orde Baru' 90-an**

Menurut Anders Uhlin (1998: 163-164), Indonesia periode akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an adalah periode pra transisi. Dalam masa ini, dominasi negara atas masyarakat memang masih kuat, namun tidak sehebat sebagaimana yang diinginkan oleh seorang pemimpin otoriter. Sebuah masyarakat sipil dengan sejumlah besar LSM yang relatif independen telah muncul dan menjadi semakin sulit bagi negara untuk mengontrolnya dan menekan unsur-unsur masyarakat

yang membangkang. Analisis terhadap aktor-aktor otoriter juga memberikan sejumlah harapan bagi demokratisasi. Konflik didalam elit penguasa telah membuka ruang politik yang lebih luas bagi para pembangkang dan telah melemahkan rezim otoriter.

Pandangan serupa juga diyakini oleh Ariel Heryanto (1999: 174) yang melihat bahwa dekade 1990-an ditandai dengan peningkatan pesat gerakan-gerakan oposisi. Wilayah geografis yang memunculkan protes-protes rakyat telah meluas, juga latar belakang sosial para partisipan dalam protes-protes tersebut. Dekade 1990-an juga dicirikan oleh melonjaknya frekwensi dan militansi gerakan-gerakan yang menentang rezim Orde Baru. Kuatnya gema moral dan religius dalam sejumlah protes menunjukkan kesinambungan dengan protes rakyat di masa lalu.

Sebagaimana dimasa lalu, demikian Heryanto (1999: 175), gerakan-gerakan oposisi baru masih didominasi oleh para aktivis kampus dan kaum profesional. Selain mahasiswa, terdapat juga jurnalis, seniman, pengacara, akademisi, dan aktivis NGO. Karena itulah, Heryanto menyebutnya sebagai "oposisi kelas menengah".

Konteks inilah yang membantu kita untuk mendapatkan pemahaman bagaimana pers Indonesia mengkonstruksi realitas perihal pembredelan pers 1994 tersebut. Sebagaimana diketahui, sejarah Orde Baru menorehkan cerita kelam bagi kehidupan pers di Indonesia. Sebelumnya, pada awal kemunculannya, Orde Baru menawarkan bulan madu dalam hubungannya dengan pers. Sekalipun pada awal kemunculannya itu juga Orde Baru memberangus beberapa pers yang diindikasikan sebagai pers komunis. Namun, bagi pers yang mendukung munculnya Orde Baru, saat-saat runtuhnya pemerintahan Orde Lama, adalah masa yang sangat menjanjikan. Namun, masa bulan madu tetap saja harus berakhir. Buntut dari peristiwa Malari, sejumlah pers dibredel. Selanjutnya pada masa-masa hingga tahun 90-an, pembredelan terhadap pers tidak pernah berhenti. Pada bulan Juni 1994, pemerintah "membatalkan SIUPP" majalah mingguan *Tempo*, *Editor* dan tabloid *Detik*. Peristiwa ini penting apabila dikaitkan dengan konteks dekade 90-an, yang dalam pendapat banyak pengamat memiliki karakteristik khusus, yang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Bagaimana sikap pers Indonesia terhadap pembredelan tersebut ?

Usai pembredelan banyak pihak mengungkapkan pandangannya. Pandangan yang muncul berbeda-beda. Menurut kesaksian Hanazaki (1998:156), *Media Indonesia* edisi 22 Juni membuat ilustrasi mata yang sedang menangis, dalam kolom editorialnya di halaman pertama, tanpa ada komentar satu kata pun. Harian ini mengungkapkan rasa belasungkawa atas pembredelan tiga penerbitan dan sebagai protes atas tindakan pemerintah.

Protes-protes dari masyarakat, mahasiswa LSM, kaum profesional, kaum intelektual juga merebak di berbagai kota. ABRI sendiri nampaknya tidak secara aktif mendukung keputusan pemerintah. Kapuspen ABRI, Mayjen Syarwan Hamid, mengatakan kepada wartawan bahwa pembredelan adalah hal yang tidak

diinginkan dan menyedihkan, dan seharusnya tidak terjadi. Menurut wartawan di Jakarta, setelah pembredelan itu, Syarwan Hamid mengunjungi beberapa koran di Jakarta dan secara pribadi berbicara kepada para wartawan. Syarwan mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan memperlambat kebijakan keterbukaan, dan tiga penerbitan tersebut telah menjadi korban dari keputusan tersebut. Dalam perbincangan pribadi, anggota-anggota ABRI mencoba menunjukkan sikap lebih simpati terhadap keterbukaan dan pers (Hanazaki, *Ibid*).

Pandangan militer, menurut Ramage (2002:273-274) menggambarkan batas-batas dukungan militer bagi keterbukaan. Misalnya, angkatan bersenjata dikatakan mendorong berita-berita tentang oposisi didalam tubuh pemerintahan terhadap peran Habibie dalam pembelian kapal perang tersebut. Beberapa perwira, termasuk anggota Komnas HAM, Brigjen (Purn) Roekmini mengemukakan bahwa pembredelan itu merupakan langkah mundur dalam gerakan ke arah demokratisasi di Indonesia. Roekmini menekankan, ABRI ingin memperlihatkan bahwa angkatan bersenjata menentang pembredelan pers dan sebaliknya "berada di pihak rakyat". Walaupun ada pendapat seperti itu, tetapi tentara, bersama polisi, menyerang para demonstran yang memprotes pembredelan tersebut di Jakarta pada 27 Juni dan 4 Agustus.

Secara khusus bagaimana respon jurnalis *Kompas* ? Berkaitan dengan pembredelan tersebut, menurut pengamatan Hanazaki (1998: 156), *Kompas* menulis 150 kata dalam berita-nya ketika memberitakan pembredelan *Sinar Harapan*, namun ketika memberitakan pembredelan tiga penerbitan, *Kompas* menjadikannya sebagai berita utama pada halaman pertama dengan 1.500 kata. Pada berita pembredelan *Sinar Harapan* (10 Oktober 1986) *Kompas* menggunakan judul, "SIUPP Sinar Harapan Dicabut", tapi pada 22 Juni 1994 koran ini menggunakan judul aktif, yang mengisyaratkan siapa yang melakukan pembredelan tersebut "Pemerintah Mencabut SIUPP *Tempo*, *Editor*, dan *Detik*".

Respon yang lebih eskplisit datang dari Daniel Dhakidae (1994: 41-44), wartawan *Kompas*, yang menilai apabila pembredelan dilakukan hanya karena Deppen merasa sudah terlampau sering memberikan teguran, maka itu tetap tidak bisa dijadikan alasan pembredelan, dan sama sekali tidak menjadi kekuatan hukum untuk mengambil sebuah tindakan hukum, seperti pembredelan surat kabar. Menurutnya, membunuh surat kabar, sama saja dengan membunuh modal dan kebudayaan. Mengapa ? Dhakidae mengemukakan alasannya. *Pertama*, membunuh modal yang memang menjadi urusannya Orde Baru sejak awal. Tujuan Orde Baru adalah mendahulukan ekonomi dibanding lainnya, karena itu modal adalah tujuannya. *Kedua*, membunuh modal hasil keringat bangsa sendiri. *Ketiga*, membunuh daya cipta, membunuh keindahan jurnalistik, dan dengan itu membunuh kebudayaannya sendiri. *Keempat*, dengan membunuh ketiga media diatas yang bersirkulasi tinggi Orde Baru telah membunuh ekonomi semua orang yang terlibat dalam kegiatan modal yang diselenggarakan oleh ketiga penerbitan yang dibredel tersebut.

Sehari setelah pemberitaan peristiwa pembredelan, Kamis, 23 Juni 1994, *Kompas* menanggapi tindakan pemerintah terhadap tiga penerbitan nasional, dalam editorial yang berjudul "Keterbukaan Ikut Terpukul oleh Dihentikannya 3 Mingguan Berita". Sikap *Kompas* ditunjukkan pada paragraf pembuka yang menyatakan:

"Sangatlah disayangkan, keterbukaan yang ikut diselenggarakan oleh pers, sesuai dengan peran dan pembawaan media massa, mengalami pukulan oleh dibatalkannya surat izin penerbitan pers berita *Tempo*, *Editor*, dan tabloid *Detik*. Suatu langkah mundur, ditinjau dari proses keterbukaan yang merupakan perangsang sekaligus manivestasi iklim demokratis"

Menurut *Kompas*, paham kebebasan pers yang dianut oleh banyak negara ialah bahwa tindakan terhadap pers haruslah berasaskan hukum dan karena itu haruslah melalui proses pengadilan. Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan dan *forces majeure* bukanlah kekuasaan yang cenderung *arbitrary*, subyektif sepihak, melainkan lembaga pengadilan. Bagi *Kompas*, pembredelan selain tidak sesuai dengan paham kebebasan pers juga merugikan jika ditinjau dari segi pembangunan pers sebagai lembaga. Padahal, lanjut *Kompas*, itulah yang juga kita pahami dan kita sepakati bahwa pembangunan, maknanya adalah membangun lembaga, membangun institusi dan sistem, membangun sumber daya manusia, dan mengembangkan visi dan tata nilai.

Menurut *Kompas*, ketiga penerbitan tersebut telah memberi sumbangan yang tidak kecil bagi pembangunan pers sebagai lembaga. Namun, mengapa muncul keputusan yang sedemikian drastis itu ? Apabila tindakan itu dilakukan karena mengancam kestabilan nasional, menurut *Kompas* kestabilan nasional sedang tidak nampak terganggu. *Kompas*, bahkan meragukan pembinaan terhadap pers yang dilakukan pimpinan penerbitan, organisasi pers, dewan pers, dan pemerintah. Karena apabila pembinaan tersebut berjalan efektif, maka persoalan tidak akan sempat terakumulasi dan mencapai klimaks pada kejadian pembredelan tersebut.

## KESIMPULAN

Respon jurnalis *Kompas* yang direpresentasikan oleh jurnalis senior serta editorialnya, melihat bahwa pembredelan terhadap ketiga penerbitan tersebut identik dengan membunuh modal, baik modal dalam pengertian sesungguhnya, maupun modal sumber daya manusia kreatif, serta modal kelembagaan media. Respon ini tercermin dalam pemberitaan *Kompas*. Dalam beberapa pemberitaannya, dari sisi *medan wacana*, *Kompas* melihat pembredelan tersebut dalam sudut pandang negatif dan bermasalah. Ketika berkaitan dengan dimensi *penyampai wacana*, beberapa tokoh pemerintah disajikan dalam posisi yang konfliktual. Terdapat friksi dalam internal pemerintah yang tidak sepenuhnya

menyetujui tindakan tersebut. *Kompas* menyajikan pihak ketiga dalam posisi yang *favourable* dan kompeten, yang sebagian besar adalah ahli hukum, intelektual, dan aktivis. Demikian pula dari sisi *mode bahasa* nya; bahasa yang digunakan *Kompas*, misalnya, senantiasa mengutip pihak ketiga yang menentang, dan cenderung delegitimatif. Secara umum, *Kompas* menerapkan strategi diskursus yang resisten terhadap tindakan yang dikenakan pemerintah terhadap tiga penerbitan pers tersebut.

Konteks yang dikenali yang memunculkan respon dan pemberitaan yang demikian adalah situasi politik Indonesia yang oleh sementara pengamat disebut periode pra transisi atau periode peningkatnya gerakan para oposisi. Dengan demikian respon *Kompas* tersebut adalah hasil interaksi antara kognisi sosial para jurnalis dengan konteks yang kondusif yang memungkinkan adanya perlawanan (resistensi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abar, Ahmad Zaini, *Kisah Pers Indonesia: 1966-1974*, LKiS, Yogyakarta, 1995
- Dhakidae, Daniel, "Membunuh Surat Kabar: Membunuh Modal dan Kebudayaan", dalam *Kemerdekaan Sebuah Tanggungjawab, Buku Putih Pembredelan Tempo, Editor, dan Detik*, INFIGHT, Jakarta, 1994
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, LKiS, Yogyakarta, 2001
- Halliday, M.A.K. & R. Hassan, *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotika Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992
- Hanazaki, Yasuo, *Pers Terjebak*, ISAI, Jakarta, 1998
- Heryanto, Ariel, "Oposisi Kelas Menengah Indonesia Dekade 1990-an", dalam Hadijaya (Ed), *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999
- Hooker, Virginia M., "Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru", dalam Yudi Latif & Idi S. Ibrahim (Eds), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Mizan, Bandung, 1996
- Sudibyo, Agus, et.al, *Kabar-kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa*, ISAI, Jakarta, 2001
- Uhlen, Anders, *Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1998